

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup merupakan isu yang sangat penting dewasa ini pada banyak negara didunia sehingga masalah lingkungan hidup ini masuk sebagai salah satu Millenium Development Goals (MDGs) yang disepakati pada bulan September tahun 2000, saat berlangsungnya pertemuan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) di New York. Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara menyepakati Deklarasi Milenium yang menegaskan kepedulian utama secara global terhadap kesejahteraan masyarakat dunia.¹ Masalah lingkungan ini menjadi butir ketujuh dari delapan butir kesepakatan MDGs yang di sepakati yaitu setiap negara harus memastikan kelestarian lingkungan hidup. Karena sangat banyak manfaat yang akan diperoleh jika kelestarian lingkungan hidup telah terjaga seperti meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat, pengurangan resiko bencana alam (seperti banjir, longsor, abrasi dll), meningkatnya ketersediaan air bersih, berkurangnya pemukiman pemukiman kumuh dan banyak manfaat lainnya.

Indonesia pun sebagai salah satu negara anggota PBB juga ikut berperan aktif dalam mewujudkan MDGs ini termasuk juga dalam memastikan kelestarian lingkungan hidup pada semua Kabupaten/Kota disetiap Provinsi yang ada di Indonesia. Namun permasalahan lingkungan ini memang merupakan masalah yang rumit sehingga pemerintah Indonesia pun masih belum bisa mengatasi masalah lingkungan ini secara baik. Contohnya saja seperti masalah yang pada ibukota Negara Indonesia

¹ http://sekretariatmdgs.or.id/?page_id=161. Diakses 13 Maret 2015, pukul 20.00 WIB

yang seakan tidak ada habisnya.² Kota Jakarta sebagai etalase negara Indonesia setiap tahunnya tidak pernah luput dari masalah banjir yang seperti tidak ada solusinya lagi. Begitupun dengan sisi utara Jakarta yang setiap tahun pesisir pantainya selalu dikikis oleh abrasi pantai. Jika kota Jakarta saja yang merupakan kota yang tergolong kota maju di Indonesia masih sulit mengatasi masalah lingkungan ini, seperti apakah permasalahan lingkungan ini pada tingkat daerah di Indonesia.

Seperti Kota Padang yang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Barat. Kota ini memiliki jumlah penduduk paling padat diantara 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatra Barat. Berikut merupakan laporan jumlah penduduk kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2007-2014 :



²<http://socio-politica.com/2013/01/21/jakarta-sebagai-etalase-kegagalan-indonesia-dari-masa-ke-masa-1/>. Diakses 18 maret 2015, Pukul 17.00 WIB

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat

| Kabupaten / Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* |
| 1 Kab.Kep. Mentawai | 67.217 | 68.097 | 68.964 | 76.173 | 77.376 | 78.511 | 81.801 | 83.603 |
| 2 Kab.Pesisir Selatan | 435.960 | 442.257 | 448.488 | 429.246 | 433.632. | 437.638 | 442.723 | 446.479 |
| 3 Kab. Solok | 351.515 | 355.705 | 359.819 | 348.566 | 351.976 | 355.077 | 358.371 | 361.095 |
| 4 Kab. Sijunjung | 197.606 | 202.275 | 206.982 | 201.823 | 204.738 | 207.474 | 214.644 | 218.588 |
| 5 Kab.Tanah Datar | 335.132 | 335.926 | 336.604 | 338.494 | 340.893 | 342.991 | 342.915 | 343.875 |
| 6 Kab.Padang Pariaman | 384.536 | 387.195 | 389.735 | 391.056 | 394.143 | 396.883 | 400.880 | 403.530 |
| 7 Kab. Agam | 428.345 | 429.822 | 431.153 | 454.853 | 459.487 | 463.719 | 469.028 | 472.995 |
| 8 Kab.LimaPuluh Kota | 329.521 | 331.771 | 333.921 | 348.555 | 352.396 | 355.928 | 361.597 | 365.389 |
| 9 Kab.Pasaman | 253.148 | 257.374 | 261.579 | 253.299 | 256.226 | 258.929 | 263.804 | 266.888 |
| 10 Kab.Solok Selatan | 130.358 | 132.093 | 133.804 | 144.281 | 146.422 | 148.437 | 153.887 | 156.901 |
| 11 Kab Dharmasraya | 175.573 | 180.915 | 186.354 | 191.422 | 195.103 | 198.614 | 210.689 | 216.928 |
| 12 Kab Pasaman Barat | 327.788 | 333.192 | 338.567 | 365.129 | 371.000 | 376.548 | 392.922 | 401.624 |
| 13 Kota Padang | 838.190 | 856.815 | 875.750 | 833.562 | 844.316 | 854.336 | 876.676 | 889.561 |
| 14 Kota Solok | 57.120 | 58.473 | 59.837 | 59.396 | 60.301 | 61.152 | 63.525 | 64.819 |
| 15 Kota Sawah Lunto | 53.913 | 54.307 | 54.685 | 56.866 | 57.493 | 58.068 | 58.991 | 59.608 |
| 16 Kota Padang Panjang | 52.017 | 54.218 | 56.491 | 47.008 | 47.619 | 48.187 | 49.471 | 50.208 |
| 17 Kota Bukittinggi | 104.278 | 106.045 | 107.805 | 111.312 | 112.912 | 114.415 | 118.319 | 120.491 |
| 18 Kota Payakumbuh | 105.048 | 105.994 | 106.911 | 116.825 | 118.435 | 119.942 | 123.652 | 125.690 |
| 19 Kota Pariaman | 70.499 | 70.625 | 70.726 | 79.043 | 79.992 | 80.870 | 82.580 | 83.610 |
| Sumatera Barat | 4.697.764 | 4.763.099 | 4.827.973 | 4.846.909 | 4.904.460 | 4.957.719 | 5.066.476 | 5.131.882 |

Sumber : Dalam Laporan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumbar 2007-2014 (BPS Provinsi Sumbar) *Angka Sementara

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa laporan jumlah penduduk BPS tahun 2007-2014 mencatat Kota Padang memiliki 889.561 dari 5.131.882 orang jumlah penduduk Sumatera Barat pada data sementara pada tahun 2014 atau sekitar 17,33% dari jumlah keseluruhan penduduk di Provinsi Sumatera Barat. Dari gambaran jumlah penduduk saja sudah terlihat bahwa sangat banyak permasalahan lingkungan yang terjadi di kota ini dibandingkan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera barat. Padatnya penduduk Kota Padang ini mengakibatkan pemerintah daerah Kota Padang kesulitan dalam melakukan pengendalian keindahan dan kebersihan kota.

Dengan demikian padatnya kota ini sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan antara lain seperti masalah limbah, pemukiman kumuh,

ketersediaan ruang terbuka hijau, dan sampah yang mengganggu terciptanya kebersihan dan keindahan Kota Padang. Sama halnya dengan yang terjadi pada kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan permasalahan lingkungan seperti contoh diatas sangat berdampak buruk bagi kebersihan dan keindahan kota dan secara tidak langsung juga akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat yang akan terganggu. Jika tidak ada pemecahan masalah yang cepat dari pemerintah daerah maka masalah lingkungan ini akan semakin berlarut larut.

Permasalahan limbah yang ada di Kota Padang memang tidak terlalu besar persentasenya hal ini mungkin karena tidak banyaknya pabrik-pabrik besar yang ada di kota ini. Namun limbah pabrik seperti Pabrik PT Semen Padang dan Pabrik Karet Lubuk Begalung cukup besar pengaruhnya pada terganggunya kebersihan dan keindahan kota. Walaupun dampaknya hanya pada sekitar kawasan pabrik tersebut. Masyarakat sekitar pabrik Indarung juga sering mengeluhkan gangguan kesehatan akibat dari limbah yang dikeluarkan oleh pabrik ini. Asap pembuangan pabrik ini menimbulkan polusi bagi masyarakat sekitar pabrik. Sedangkan limbah cair dari pabrik karet yang ada di Lubuk begalung tentu sangat mencemari aliran sungai tempat pembuangan limbah pabrik itu yaitu Sungai Batang Arau. Sehingga hal tersebut juga mengganggu keindahan dan kebersihan Kota Padang terutama di kawasan wisata di Jembatan Siti Nurbaya.³

Sama halnya dengan limbah pabrik, masalah pemukiman kumuh di Kota Padang belum begitu memprihatinkan, tercatat pemerintah Kota Padang telah

³<http://minangkabaunews.com/artikel-367-pencemaran-sungai-persoalan-serius-di-padang.html>. Di akses 18 Maret 2015, Pukul 17.30 WIB

melakukan pembenahan terhadap pemukiman kumuh di Kota Padang yaitu dengan merelokasi perkampungan nelayan yang ada di daerah Ulak Karang ke rusunawa yang telah di sediakan oleh pemerintah Kota Padang. Namun rusunawa itu tidak tepat sasaran dan cenderung disalahgunakan oleh masyarakat. Walaupun pelaksanaan relokasi itu belum terlaksana dengan baik dengan berbagai kendala tapi sudah sudah ada upaya dari pemerintah kota untuk menanggulangi masalah pemukiman tersebut.⁴

Ketersediaan ruang terbuka hijau saat ini juga menjadi masalah lingkungan yang terjadi di Kota Padang dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan indah. RTH di Kota Padang saat ini masih belum memenuhi standar RTH yang telah ditetapkan undang undang. Dimana dari 30 persen yang ditetapkan⁵ masih belum terealisasi dengan baik di Kota Padang. RTH yang ada di Kota Padang juga terpisah pisah, ada dua RTH besar yang masih bisa dikatakan baik pengelolaannya yaitu RTH Imam bonjol dan RTH Taman melati. Namun masih perlu banyak perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Padang agar 2 RTH ini bisa beroperasi secara maksimal.

Yang terakhir adalah masalah sampah, dimana Kota Padang sebagai kota dengan penduduk terpadat di provinsi Sumatra Barat tentunya juga berbanding lurus dengan sampah yang di produksi tiap harinya. Jumlah produksi sampah di Kota Padang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

⁴<http://www.antarasumbar.com/berita/padang/d/2/360400/wali-kota-tidak-menampik-penyalahgunaan-rusunawa-padang.html>. Di akses 18 Maret 2015, Pukul 20.00 WIB

⁵Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 29

Tabel 1.2
Produksi Sampah Kota Padang

| No | Tahun | Jumlah Penduduk | Produksi Sampah/hari (m ³) |
|----|-------|-----------------|--|
| 1 | 2010 | 833.562 | 1.667,124 |
| 2 | 2011 | 846.371 | 1.692,742 |
| 3 | 2012 | 871.534 | 1.743,068 |
| 4 | 2013 | 911.567 | 1.823,123 |

Sumber : Data Produksi Sampah Kota Padang DKP Kota Padang, 2014

Berdasarkan table 1.2 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya di Kota Padang. Peningkatan jumlah sampah tersebut berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Padang yang juga selalu meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2010 hingga 2013. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk Kota Padang sebesar $\pm 2,6\%$ pertahun ini ditandai dengan peningkatan berbagai aktivitas sosial ekonomi yang menyebabkan meningkatnya timbulan sampah di Kota Padang.

Pada saat sekarang ini produksi sampah di Kota Padang sudah mencapai 500 ton perhari. Sampah tersebut berasal dari berbagai sumber. $\pm 60\%$ produksi sampah berasal dari aktivitas pemukiman/ hotel/restoran/kantor . $\pm 30\%$ produksi sampah berasal dari aktivitas pasar/pertokoan. Sedangkan $\pm 10\%$ lainnya berasal dari sumber sumber lainnya. Dengan jumlah produksi sampah yang sangat besar itu jika tidak ada tindakan yang tepat dari pemerintah Kota Padang dalam menyelesaikan masalah sampah ini maka ini akan menimbulkan masalah yang baru nantinya seperti banjir dan munculnya pemukiman kumuh yang membuat permasalahan sampah ini semakin rumit nantinya.

Kepala DKP Kota Padang pun menuturkan dengan volume sampah yang sangat besar itu, akan sulit mewujudkan kebersihan jika masyarakat hanya menggatungkan masalah pengelolaan masalah sampah hanya pada DKP saja.⁶Hal tersebut diakibatkan kurangnya petugas serta sarana dan prasarana yang ada. Karena pada tahun 2014 saja tercatat hanya ada 50 unit container yang akan mengangkut sampah itu. Hal itu masih dirasakan kurang untuk mengangkut sampah yang mencapai 500 ton perhari itu. Sehingga banyak di tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan sementara (TPS) terlihat sampah yang menggunung. Bak sampah otomatis yang disediakan pemerintah tidak mampu menampung semua sampah yang ada. Bahkan sampah yang ada disekitar bak sampah itu jumlahnya bisa mencapai 3 kali lipat sampai 5 kali lipat dari muatan bak sampah di beberapa titik tertentu.⁷

Sampah yang diangkut oleh petugas kebersihan hanya yang ada pada bak container yang telah disiapkan itu saja sedangkan sampah yang berserakan di luar bak sampah di biarkan begitu saja sehingga semakin hari semakin susah untuk dikelola. Sampah yang ada pada satu tempat pembuangan sementara itu bisa mencapai 8 ton per hari sedangkan yang bisa diangkut oleh petugas kebersihan hanya sekitar 4-5 ton perhari. Sisanya itulah yang semakin hari semakin tidak terurus dan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Selain menimbulkan aroma tidak sedap hal ini tentunya sangat mengganggu keindahan dan kebersihan kota dan juga bisa menjadi sumber penyakit bagi

⁶ Bisnis.com. wah, produksi sampah di kota padang capai 500 ton/ hari. Di akses pada 13 maret 2015, Pukul 15.00 WIB

⁷ Haluan.com. Sampah menggunung di kota Bengkulu. Diakses pada 13 maret 2015, Pukul 15.00 WIB

<http://www.harianhaluan.com/index.php/haluan-kita/25607-sampah-menggunung-di-kota-bengkluang>. Diakses pada 13 maret 2015, Pukul 15.00 WIB

warga di sekitar tempat pembuangan tersebut. Hal yang tersebut hampir terjadi di seluruh kecamatan di Kota Padang.⁸

Belum selesai dengan masalah diatas ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampahnya tidak berada pada tempat yang seharusnya. Hal ini semakin membuat petugas kebersihan lebih bekerja keras lagi dalam melakukan pembersihan. Sampah-sampah ini pun jumlah tidak kalah banyak dengan yang ada pada tempat pembuangan sementara. Sehingga tidak heran jika Kota Padang tidak lagi mendapatkan piala adipura sebagai lambang kebersihan Kota Padang semenjak setelah gempa pada 2009 silam. Memang masalah sampah menjadi batu sandungan terbesar mengapa Kota Padang tidak lagi dapat membawa piala adipura ke Kota Padang.⁹

Untuk itu, Pemerintah kota harus terus berperan aktif mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya dalam menjaga lingkungan serta ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungannya. Berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat telah banyak dilakukan oleh pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Karena percuma DKP melakukan program-program untuk kebersihan dan keindahan di Kota Padang jika masyarakatnya sendiri tidak peduli akan hal itu. Jadi, sebelum program program lain dilakukan harus ada dulu pendekatan atau sosialisasi yang lebih bersifat untuk mengajak, membina dan

⁸ <http://www.harianhaluan.com/index.php/haluan-kita/25607-sampah-menggunung-di-kota-bengkuang>. Diakses pada 13 maret 2015, Pukul 16.00 WIB

⁹ <http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/34366-untuk-raih-adipura-sampah-jadi-sandungan-padang>. Di akses 18 maret 2015, Pukul 20.00 WIB

meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan Kota Padang sendiri.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang No 67 tahun 2012 Tentang Penjabaran Tupoksi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan memang disebutkan bahwa pembinaan masyarakat untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan kota adalah TUPOKSI dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Tupoksi tersebut terdapat pada Bidang program dan penyuluhan. Berikut penjabaran tupoksi bidang program dan penyuluhan tersebut :

- (1) Bidang Program dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Program dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Program, Pengendalian dan Penyuluhan, menghimpun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menegakan peraturan dibidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) kota.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Bidang Program dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dinas jangka panjang, menengah dan tahunan;

- b. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara periodik;
- c. lakukan koordinasi dan pengawasan dengan instansi terkait dalam penertiban peraturan daerah tentang kebersihan dan keindahan kota;
- d. pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi K-3;
- e. lakukan kerjasama dengan pihak lain serta menghimpun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota;
- f. penyusunan laporan dinas;
- g. pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Program dan Penyuluhan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Program dan Penyuluhan dibantu oleh beberapa seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yaitu :

- a. Seksi Program dan Pengendalian
- b. Seksi Penyuluhan dan Peran serta masyarakat.¹⁰

Dari Perwako diatas jelas disebutkan bahwa memang pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan itu adalah salah satu tupoksi dari Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Padang. Tupoksi itu terdapat

¹⁰ Perwako Padang no 67 tahun 2012 tentang penjabaran tupoksi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

pada bidang program dan penyuluhan yang terdapat pada ayat 2 dan 3 yaitu tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dari bidang program dan penyuluhan yang menunjukkan bahwa salah satu tugasnya yaitu menghimpun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menegakan peraturan dibidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) kota.

Oleh karena itu DKP pun telah banyak membuat dan melakukan kegiatan terkait dengan penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat tersebut. Pada tahun 2015 ini, dari banyak program yang ada di DKP Kota Padang salah satu program yang menyangkut dengan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat yaitu Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan.

Pada tahun 2015 didalam Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini terdapat kegiatan kegiatan yang mendukung tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk turut aktif menjaga lingkungan. Pada Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini ada beberapa kegiatan antara lain:

1. Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan.

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan adalah kegiatan untuk pengadaan sarana dan prasarana pertamanan yang dibutuhkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam rangka untuk melaksanakan kebersihan keindahan dan ketertiban Kota Padang nantinya.

2. Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan.

Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pembibitan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan penyediaan sarana dan prasarana pembibitan.

3. Pembersihan (goro massal) dan pengangkatan sampah yang bersifat insidental.

Kegiatan pembersihan dan pengangkatan sampah yang bersifat insidental adalah kegiatan pembersihan sampah akibat dari keadaan yang bersifat insiden seperti banjir, kebakaran, angin kencang, ada sampah yang menumpuk, acara-acara seperti konser, kampanye pemilu, maupun acara-acara gorro yang diadakan oleh instansi pemerintah daerah, dll.

4. Lomba K-3 dan taman se-Kota Padang.

Lomba K 3 dan taman se Kota Padang adalah salah satu kegiatan pada Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan yang bertujuan untuk memotivasi dan mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungannya serta untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan hijau dalam rangka mewujudkan Kota Padang yang bersih dan hijau (*Clean and Green City*).

5. Pemeliharaan rutin/berkala taman tugu dan pengecatan pot bunga.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman tugu dan pengecatan pot bunga adalah kegiatan pemeliharaan taman-taman tugu yang ada di Kota Padang serta pengecatan pot-pot bunga yang ada di sepanjang jalan-jalan utama Kota Padang.

6. Pembersihan trotoar dan riol.

Kegiatan Pembersihan trotoar dan riol adalah salah satu kegiatan dalam Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan. Keegiatannya yaitu pembersihan semua trotoar dan riol yang ada pada jalan jalan utama Kota Padang.

7. Pengadaan mobil tangga beserta alat keselamatannya.

Kegiatan selanjutnya dari Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini yaitu pengadaan mobil tangga beserta alat keselamatannya. Pengadaan mobil tangga beserta alat keselamatannya ini bertujuan untuk menambah sarana dan prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam mengelola lingkungan di Kota Padang.

8. Pembuatan taman tematik Kota Padang.

Kegiatan yang terakhir dalam Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini yaitu kegiatan pembuatan taman tematik Kota Padang. Taman tematik adalah taman yang dibuat atau dirancang dengan tema tertentu yang telah disesuaikan dengan tujuan pembuatannya.

Dari Program Kegiatan Pembinaan Kebersihan dan Sarana Pertamanan seperti yang telah di uraikan diatas terlihat bahwa peningkatan peran serta masyarakat sudah di upayakan oleh DKP Kota Padang melalui kegiatan kegiatan yang sifatnya mengajak dan membina seperti lomba K3, goro massal dll. Peneliti melihat bahwa pelaksanaan kegiatan kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan program ini maka DKP akan bisa mengurangi masalah tentang kebersihan ini langsung pada sumbernya. Sehingga Jika masalah tentang pengelolaan kebersihan ini sudah bisa diatasi pada sumbernya maka tugas dari DKP sendiri menjadi lebih ringan dalam mengelola kebersihan dan keindahan kota.

Namun kenyataannya, pada Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan yang dilakukan oleh DKP Kota Padang terlihat bahwa kegiatan kegiatan yang dilakukan itu masih belum dirasakan dampaknya secara signifikan oleh masyarakat Kota Padang secara umum. Hal itu terbukti dengan masih tingginya angka volume produksi sampah Kota Padang yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh DKP ini telah disokong oleh anggaran dana yang cukup besar dari APBD Kota Padang. Dana itu bersumber dari APBD Kota Padang.

Pada tahun 2015 dalam program ini dilaksanakan sebanyak delapan kegiatan yang meliputi, pembersihan dan pengangkutan sampah yang bersifat insidental dan disediakan anggaran sebesar Rp 64 juta. Lalu, kegiatan penyediaan sarana prasarana pembibitan disediakan anggaran Rp 60 juta dan pengadaan sarana dan prasaran pertamanan dialokasikan dana Rp 60 juta. Berikutnya, kegiatan lomba K3 dan taman se-Kota Padang dengan dana penyelenggaraan dikucurkan sebesar Rp 127,54 juta dan kegiatan pembuatan taman tematik dengan anggaran Rp 170 juta. Kegiatan pembersihan trotoar dan riol sebesar Rp 510 juta serta Kegiatan pengadaan mobil tangga dianggarkan Rp 1,2 M Satu kegiatan lainnya, pemeliharaan rutin dan berkala taman, tugu dan pengecatan pot bunga disediakan anggaran Rp 225 juta¹¹. Dengan sokongan dana seperti yang telah di uraikan diatas seharusnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan Program pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan ini.

¹¹ <http://sumbar.antaranews.com/berita/34426/padang-alokasikan-rp47261-juta-untuk-kebersihan.html>. Diakses pada 6 juli 2015, pukul 19.00 WIB

Untuk itu, harus ada manajemen yang baik dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan sendiri agar program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berhasil guna sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, program yang telah dilaksanakan tidak akan berjalan sia sia begitupun dengan anggaran yang dipakai untuk menjalankan program ini. Pada kenyataan yang terjadi saat ini peneliti melihat program pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan ini masih belum begitu dirasakan dampaknya kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya partisipasi masyarakat serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota. Contohnya seperti masih banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah ke selokan/ sungai, banyaknya selokan yang tersumbat, sampah yang masih bercampur antara sampah organik dan an organik, sampah yang masih berserakan di sekitar TPS.¹²

Dari segi perencanaan, perencanaan Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini dilakukan melalui beberapa tahap. Mulai dari tahap pembuatan rencana sampai dengan pengesahan rencana. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat, yang menyatakan bahwa :

“Perencanaan yang dilakukan yaitu rencana dikumpulkan dari berbagai yang ada di DKP, lalu bidang program akan menyaring rencana mana yang menjadi prioritas untuk nantinya diusulkan kepada tim anggaran Bappeda untuk nantinya bisa disahkan. Begitupun untuk

¹²<http://m.minangkabaunews.com/artikel-3136-tingkat-kesadaran-warga-buang-sampah-di-padang-rendah.html>. Diakses tanggal 18 Maret 2015, Pukul 19.00 WIB

Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa perencanaan dari Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu bidang program mengumpulkan rencana rencana yang telah dibuat oleh bidang bidang lain yang ada pada DKP Kota Padang seperti bidang kebersihan, bidang pertamanan, bidang retribusi, serta bidang program dan penyuluhan. Kemudian pada bidang program rencana rencana tersebut nantinya akan dipilih rencana mana yang menjadi prioritas untuk dimasukkan kedalam rencana kerja dinas tersebut untuk satu tahun anggaran. Rencana kerja tersebut kemudian disusun kedalam program program salah satunya yaitu Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan.

Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini sendiri dibuat dan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti yang disampaikan oleh Kasi Program dan Pengendalian DKP Kota Padang yaitu :

“Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini sendiri dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang urusan wajib pemerintah daerah yaitu tentang lingkungan hidup. Jadi berdasarkan itu disusunlah beberapa kegiatan kedalam program ini yang sesuai dengan isi dari Peraturan Pemerintah itu.”¹⁴

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibuk. Wiwi Nelza, Kasi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat DKP Kota Padang. Pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 pada pukul 10.00-11.00

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bpk. Marzuki, Kasi Program dan Pengendalian DKP Kota Padang. Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 pada pukul 11.00-11.30.

Berdasarkan hasil wawancara diatas jelas disebutkan bahwa Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jadi, kegiatan kegiatan yang ada dalam program ini disusun dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut yaitu urusan pemerintah daerah mengenai urusan lingkungan hidup. Sedangkan pelaksanaan kegiatan kegiatan yang ada dalam program ini nantinya akan diatur oleh kerangka acuan kerja atau TOR (Term Of References) yang telah dibuat sebelumnya.

Namun dalam Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini terlihat bahwa perencanaan yang dilakukan masih belum matang. Hal terlihat dari tidak adanya petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dalam melaksanakan program ini. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti yang disampaikan oleh Kasi Program dan Pengendalian DKP Kota Padang yaitu :

“Dalam program pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan ini tidak ada petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan program ini. Namun hanya memakai kerangka acuan kerja pada masing masing bidang yang bertanggungjawab dalam program ini.”¹⁵

Berdasarkan Hasil wawancara diatas disebutkan bahwa memang tidak ada pedoman atau acuan seperti petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang mengatur mengenai pelaksanaan program ini. Hanya berdasarkan kepada kerangka acuan kerja masing masing bidang yang terlibat dalam program ini saja. Seharusnya agar

¹⁵ *Ibid.*

pencapaian keberhasilan program ini lebih maksimal maka harus ada pedoman yang mengatur bagaimana pelaksanaan dari program ini secara utuh. Sehingga program yang dilaksanakan akan berjalan lebih efektif dan efisien.

Pengorganisasian yang dilakukan oleh DKP Kota Padang dalam melaksanakan Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini yaitu dengan membagi dan menyerahkan kegiatan kegiatan yang ada dalam Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini kepada bidang bidang yang sesuai dengan tupoksi bidang bidang tersebut. Sesuai yang disampaikan Kasi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat, yang menyatakan bahwa :

“Masing masing kegiatan yang ada pada Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini tanggungjawabnya ada pada masing masing bidang yang melekat pada tupoksinya. Jadi dalam program pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan ini ada 3 bidang dan 1 sub bagian yang melaksanakan 8 kegiatan yang ada dalam program tersebut.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa dalam Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini ada 3 bidang dan 1 sub bagian yang melaksanakan 8 kegiatan yang terdapat pada program tersebut. Kegiatan lomba K3 dan taman se Kota Padang pelaksana kegiatannya adalah bidang program dan penyuluhan. Untuk pembersihan trotoar dan riol dan kegiatan pembersihan dan pengangkutan sampah yang bersifat insidentil dilaksanakan oleh bidang kebersihan. Sedangkan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pembibitan, pengadaan sarana dan prasarana pertamanan, pemeliharaan rutin/berkala taman tugu dan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibuk. Wiwi Nelza, Kasi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat DKP Kota Padang. Pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 pada pukul 10.00-11.00

pengecatan pot bunga dan pembuatan taman tematik Kota Padang itu dibawah tanggung jawab bidang pertamanan. Sedangkan kegiatan pengadaan mobil tangga beserta alat keselamatannya pelaksana kegiatannya adalah sub bagian umum. Pembagian tanggungjawab pelaksana kegiatan kegiatan yang ada pada program ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing masing bidang tersebut.

Pelaksanaan kegiatan kegiatan yang ada pada program tersebut dilakukan pada masing masing bidang yang telah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan. Pelaksanaan kegiatannya didasarkan kepada TOR atau kerangka acuan kerja yang telah dibuat sebelumnya. Dengan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari masing masing kegiatan dalam program ini maka diharapkan akan tercipta sinergi yang baik antara sesama bidang yang ada pada DKP Kota Padang.

Namun pada program ini peneliti melihat belum adanya koordinasi yang baik antar sesama bidang karena kegiatan kegiatan yang dilakukan dalam program ini dilaksanakan oleh masing masing bidang tanpa adanya koordinasi yang jelas dengan bidang yang lain. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti yang disampaikan oleh Kasi Program dan Pengendalian DKP Kota Padang yaitu :

“Dalam Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini tidak ada kordinasi antar sesama bidang dalam melaksanakan kegiatan yang ada, jadi pelaksanaan kegiatan yang ada pada program ini terserah kepada masing masing bidang yang menjadi pelaksana kegiatan itu, jika mereka telah siap untuk melaksanakan maka akan dilaksanakan oleh bidang terkait”¹⁷

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk. Marzuki, Kasi Program dan Pengendalian DKP Kota Padang. Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 pada pukul 11.00-11.30.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa tidak ada kordinasi yang baik antar sesama bidang yang menjadi pelaksana kegiatan kegiatan yang ada dalam program ini. Pelaksanaan kegiatan dalam program ini berjalan sendiri sendiri tanpa ada kordinasi dan komunikasi dengan bidang yang lain. Padahal kegitan kegiatan yang dilaksanakan masih dalam satu program yang sama dan dasar kebijakan yang sama. Seharusnya pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing masing bidang ini harus memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih wewenang nantinya.

Pengorganisasian yang dilakukan pada program ini juga terkendala pada kualitas sumberdaya atau tingkat pendidikan pegawai yang masih belum baik pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini sendiri. Meskipun di akui dari segi kuantitas sudah mencukupi. Berikut adalah jumlah pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang berdasarkan tingkat pendidikannya :

Tabel 1.3

Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Berdasarkan tingkat Pendidikannya

| No | Status Kepegawaian | Pendidikan | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|----|------|------|----|
| | | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD |
| 1 | PNS | 9 | 32 | 5 | 167 | 31 | 82 |
| 2 | Jumlah | 9 | 32 | 5 | 167 | 31 | 82 |

Sumber : Data Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2014

Dari tabel 1.3 diatas terlihat bahwa sebagian besar tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang adalah SLTA kebawah. Bahkan jumlah pegawai yang mempunyai tingkat pendidikan SD juga cukup besar yaitu berjumlah 82 orang. Hal Itu membuat pelaksanaan program program yang ada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan khususnya pada Program Pembinaan Kegiatan

Kebersihan dan Sarana Pertamanan agak sulit tercapai secara maksimal. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Program dan Pengendalian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, yaitu :

“Jumlah pegawai yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini sudah mencukupi atau malah bisa dikatakan berlebih untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan yang ada di dinas ini. Namun jumlah yang banyak tersebut berbeda dengan kualitasnya dimana jika dilihat dari kemampuan dan tingkat pendidikannya masih sangat kurang.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa secara umum jumlah sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sudah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada. Tapi jumlah sumberdaya manusia yang ada tersebut tidak berbanding lurus dengan kapasitas dan kapabilitas yang mereka miliki. Sehingga pencapaian sasaran dan tujuan dari setiap program maupun kegiatan yang ada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang menjadi terkendala.

Bentuk motivasi yang dilakukan oleh DKP kota Padang pada program ini yaitu dengan pemberian peringatan (*punishment*) kepada para pegawai yang belum melakukan tupoksinya dengan baik. Motivasi itu diberikan kepada seluruh pegawai yang ada pada DKP Kota Padang dan untuk semua Program yang ada termasuk Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan ini sendiri. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat DKP Kota Padang yaitu :

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk. Marzuki, Kasi Program dan Pengendalian DKP Kota Padang. Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2016 pada pukul 11.30-12.00.

“*punishment* yang diberikan berupa peringatan peringatan yang diberikan kepada para pegawai yang belum melakukan tupoksinya dengan baik. Jadi setiap senin para pejabat struktural dikumpulkan oleh kepala dinas untuk mengecek sejauhmana tupoksi telah dilaksanakan.”¹⁹

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa telah ada *punishment* yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya di DKP Kota Padang. Walaupun *punishment* yang diberikan baru berupa peringatan peringatan yang diberikan dari atasan kepada bawahan yaitu setiap hari senin Kepala dinas mengumpulkan semua pejabat struktural yang ada untuk mengecek sejauhmana tupoksi yang telah mereka laksanakan. Jika ada pegawai yang belum melaksanakan tupoksinya dengan baik maka pada saa itulah peringatan diberikan. Motivasi ini memang dirasakan belum maksimal karena belum adanya *reward* yang baik yang dilakukan pada DKP kota Padang.

Sedangkan untuk motivasi berupa *reward* bisa dikatakan belum ada.. Hal itu sesuai hasil wawancara dengan Kasi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat, yaitu :

“Untuk *reward* kami belum melakukan karena tidak ada aturan yang mewajibkan untuk itu serta belum dirasakan perlu karena pelaksanaan tugas merupakan tupoksi masing masing pegawai yang memang harus dilaksanakan”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa memang belum ada *reward* yang diberikan kepada para pegawai yang ada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, ,baik reward berbentuk hadiah, penghargaan, maupun kenaikan jabatan. Hal tersebut terjadi karena menurut mereka tidak ada suatu aturan yang mewajibkan untuk

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibuk. Wiwi Nelza, Kasi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat DKP Kota Padang. Pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 pada pukul 10.00-11.00

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibuk. Wiwi Nelza, Kasi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat DKP Kota Padang. Pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 pada pukul 10.00-11.00

pemberian *reward* bagi pegawai serta menurut mereka pelaksanaan tugas dengan baik memang sudah seharusnya karena merupakan tupoksi para pegawai. Namun seharusnya setiap pemberian *punishment* harus diimbangi pula dengan pemberian *reward* bagi para bawahan agar ada keseimbangan yang terjadi sehingga motivasi yang diberikan menjadi lebih maksimal.

Sedangkan bentuk *controlling* atau pengawasan yang dilakukan oleh DKP Kota Padang yaitu selain yang bisa dilihat dari pernyataan hasil wawancara diatas. Pengawasan dan evaluasi juga dilakukan setiap bulan oleh kepala dinas kepada setiap bidang yang ada pada DKP Kota Padang melalui laporan realisasi fisik dan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasi Program dan Pengendalian, yang menyatakan bahwa :

“Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu Kepala Dinas mengevaluasi setiap bidang bidang yang ada melalui laporan realisasi fisik dan keuangan, bagaimana pelaksanaan program program dari setiap bidang tersebut. Evaluasi ini dilakukan setiap bulan oleh Kepala Dinas.”²¹

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa *controlling* atau pengawasan telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Padang. Pada Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan sendiri evaluasi dan pengawasan dilakukan pada masing masing bidang yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan kegiatan tersebut. Jadi evaluasi serta pengawasan 8 kegiatan yang ada pada Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan dilakukan pada masing masing bidang yang bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatannya. Dengan

²¹ *Ibid.*

adanya pengawasan yang baik dari atasan kepada bawahan maka diharapkan akan tercipta komunikasi yang baik dalam pelaksanaan program program yang ada. Sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik nantinya.

Dari gambaran proses manajemen secara umum yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam Program pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan seperti yang telah dijelaskan diatas terlihat bahwa masih banyak masalah masalah yang ditemui dalam pelaksanaan manajemen program ini. Masalah masalah tersebut antara lain perencanaan yang kurang baik seperti tidak adanya petunjuk pelaksanaan dari program ini. Tidak adanya kordinasi antar bidang dalam melaksanakan program ini. Serta motivasi yang masih dirasakan kurang dalam program ini apalagi tidak ada *reward* apapun yang diberikan kepada pegawai yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu maka peneliti tertarik ingin melihat lebih dalam sebenarnya bagaimana manajemen program yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan program ini yang dilaksanakan pada tahun 2015.

Berdasarkan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Manajemen Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan Dan Sarana Pertamanan Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.”**

1.2.Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap diantara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Merujuk

pada paparan diatas, maka diambil rumusan masalah guna pembahasan sebagai batasan penelitian yaitu bagaimana Manajemen Program Kegiatan Pembinaan Kebersihan dan Sarana Pertamanan Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan masalah tentang hal yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian dengan cara mempertimbangkan masalah yang terjadi dan membandingkan dengan yang seharusnya. Dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen Program Kegiatan Pembinaan Kebersihan dan Sarana Pertamanan Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen terutama fungsi-fungsi manajemen tentang *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *motivating* (pemberian motivasi) dan *controlling* (pengawasan), apa saja yang harus ada didalam menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari, sebab tanpa kita sadari apa yang kita perbuat dalam hidup ini menggunakan ilmu manajemen, terutama dalam bidang organisasi baik swasta maupun pemerintah.

1.4.2. Manfaat praktis

Untuk memperkuat teori bahwa fungsi-fungsi manajemen terutama *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *motivating* (pemberian motivasi) dan *controlling* (pengawasan) merupakan suatu kunci keberhasilan dalam suatu program.

